

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : III
Rapat ke- : 6
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan:
1. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan
3. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 20 Januari 2021
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.

Acara : Pembahasan mengenai Penggunaan Dana Perkebunan untuk Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

Ketua Rapat : Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F.NasDem) dilanjutkan oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)

Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)

Hadir : A. 46 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir:
1. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian);
2. Dr. Andin Hadiyanto, M.A. (Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan); dan
3. Eddy Abdurrachman (Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit membahas mengenai Penggunaan Dana Perkebunan untuk Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F.NasDem) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk meningkatkan alokasi penyaluran dana yang dihimpun untuk peremajaan kelapa sawit. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menyesuaikan besaran bantuan dana peremajaan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehubungan dengan dana hanya cukup membiayai kegiatan peremajaan sampai tahun pertama saja.
2. Komisi IV DPR RI memahami penggunaan dana BPDPKS untuk hilirisasi biodiesel, namun Komisi IV DPR RI meminta agar penggunaan dana BPDPKS lebih berpihak kepada peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit.
3. Komisi IV DPR RI menilai penyederhanaan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah tidak memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja Peremajaan Sawit Rakyat. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memperbaiki persyaratan dalam penyaluran Peremajaan Sawit Rakyat sehingga tercapai target sasaran Peremajaan Sawit Rakyat dengan melibatkan *stakeholder* terkait dalam waktu 1 (satu) bulan.
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah menjamin benih sawit yang dipergunakan untuk peremajaan sesuai dengan syarat teknisnya. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar anggaran peningkatan jaminan kualitas benih sawit tersebut agar dibebankan kepada BPDPKS di luar dari anggaran Peremajaan Sawit Rakyat yang ditransfer kepada petani.

5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait data luasan perkebunan kelapa sawit, data produksi, serta permasalahan legalitas lahan terutama lahan yang menjadi prioritas program Peremajaan Sawit Rakyat, agar program Peremajaan Sawit Rakyat dapat segera dipercepat dan dana yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit digunakan dengan prioritas untuk Peremajaan Sawit Rakyat.
6. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk menyelesaikan legalitas lahan petani peserta peremajaan yang berasal dari kawasan hutan dan kegiatan program Pemerintah seperti PIR-BUN, PIR-Trans, PIR-KKPA serta petani plasma dan swadaya dengan program khusus yang pendanaannya diusulkan dari dana BPDPKS.
7. Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah untuk *me-redesign* kelembagaan BPDPKS, yang transparan dan akuntabel, dengan struktur kelembagaan yang lebih membawa manfaat bagi petani sawit rakyat.
8. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada petani sawit yang belum tergabung dalam kelembagaan petani, sehingga terbentuk kelembagaan petani yang kuat dan mampu mengadopsi berbagai program pembangunan yang dilakukan Pemerintah termasuk peremajaan tanaman secara optimum.
9. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah agar secara progresif menyusun *grand design* pemanfaatan dana perkebunan yang peruntukannya digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana perkebunan, agar program kelapa sawit berkelanjutan dapat dinikmati oleh petani kelapa sawit.
10. Komisi IV DPR RI meminta kepada BPDPKS agar menjamin ketersediaan dana sesuai dengan target alokasi peremajaan yang sudah ditetapkan dan mentransfernya dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah rekomendasi teknis disetujui dan diajukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

11. Komisi IV DPR meminta kepada Pemerintah untuk melaporkan kemajuan Peremajaan Sawit Rakyat dan permasalahan yang dihadapinya secara berkala kepada Komisi IV DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.05 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151

Direktur Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.

Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan,

Ttd.

Dr. Andin Hadiyanto, M.A.

Direktur Utama
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit,

Ttd.

Eddy Abdurrachman